

# KIM

## Dukung Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi, F-PKS DPR 'Walk Out' dari Paripurna

Updates. - [KIM.WEB.ID](http://KIM.WEB.ID)

Sep 7, 2022 - 09:36



*Anggota F-PKS DPR RI Mulyanto yang mewakili F-PKS DPR RI dalam Rapat Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023*

JAKARTA - Menanggapi kebijakan pemerintah [Indonesia](#) yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak ([BBM](#)) bersubsidi per Sabtu (3/9/2022), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-[PKS](#)) [DPR RI](#) menyatakan penolakan kebijakan tersebut dengan walk out dari Rapat Paripurna. Pasalnya, berdasarkan aspirasi rakyat [Indonesia](#), F-[PKS](#) [DPR RI](#) menekankan kenaikan harga [BBM](#) bersubsidi akan memberatkan hajat hidup rakyat [Indonesia](#).

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota F-[PKS](#) [DPR RI](#) [Mulyanto](#) yang mewakili F-[PKS](#) [DPR RI](#) dalam Rapat Rapat Paripurna [DPR RI](#) ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, [Jakarta](#), Selasa (6/9/2022).

“Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui [PKS](#). Dengan ini, kami menyatakan bahwa Fraksi [PKS](#) menolak kenaikan harga [BBM](#) bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini, di depan demo yang dilaksanakan oleh masyarakat, kami mendukung penolakan ini. Karenanya, dengan ini, kami, Fraksi [PKS](#) menyatakan walk out dari forum (Rapat Paripurna) ini,” ucap [Mulyanto](#).

Diketahui, Presiden [Joko Widodo](#) mengumumkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pemerintah [Indonesia](#) akan menetapkan kenaikan harga [BBM](#) bersubsidi pada per Sabtu (3/9/2022). Ia menerangkan keputusan ini diambil sebagai pilihan terakhir pemerintah. Rencananya, Presiden [Jokowi](#) menjelaskan subsidi [BBM](#) akan mengalami penyesuaian. Di mana, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Oleh sebab itu, F-[PKS](#) [DPR RI](#) menolak kebijakan tersebut karena akan menurunkan daya beli rakyat Indonesia di tengah pemulihan akibat pandemi Covid-19. Ditambah lagi, F-[PKS](#) [DPR RI](#) juga menilai kenaikan [BBM](#) bersubsidi bukan kebijakan yang bijaksana pada saat rakyat Indonesia terpukul akibat imbas kenaikan harga minyak goreng dan pangan beberapa waktu lalu. (ts/sf)